

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NINING

Nomor Stambuk: 105611117918

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan
Baroko Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Nining
Nomor Induk Mahasiswa : 105611117918
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 060/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

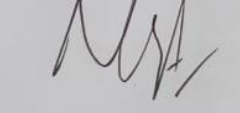
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua) ()
2. Drs.H. Ansyari Mone, M. Pd ()
3. Dr. Hafiz Elfiansya P, M.Si ()
4. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nining

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117918

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Juli 2022

Yang Menyatakan



Nining

ABSTRAK

NINING 2022, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (Di bimbing oleh Budi Setiawati dan Ansyari Mone).

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar benar terjadi di lapangan selama penelitian. Dalam penelitian ini terdapat informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari kepala desa Patongloan, sekretaris desa Patongloan, anggota BPD, 3 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam bentuk: 1). Partisipasi pikiran yaitu: a). bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dan b). keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), 2). Partisipasi tenaga dalam bentuk kerja bakti dan gotong royong 3). Partisipasi keahlian dalam bentuk keterampilan, 4). Partisipasi barang dalam bentuk alat dan perkakas dan 5). Partisipasi uang berupa iuran dana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Patongloan masih sangat minim dan masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kata Kunci:Partisipasi masyarakat ,pembangunan infrastruktur

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa peneliti ungkapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman.

Atas segala keridhoan Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah, hingga kekuatan-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”*. Ini akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis
5. Teristimewah untuk kedua orang tua saya ayahanda Nurdin dan Ibunda Nurjannah, karena berkat do'a, kasih sayang yang begitu tulus dan dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas dan lahir batin mendidik, merawat, membina, membesarkan dan mendampingi sehingga penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini.
6. Dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil
7. Pihak aparat dan masyarakat desa yang telah membantu memberikan informasi dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi.
8. Kakak saya dan keluarga yang selalu memberikan support dan semangat menyelesaikan skripsi.
9. Dan orang terdekat saya Zulfikar Mangopo yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dan selalu meluangkan waktu kapan pun untuk mengantarkan saya bimbingan skripsi
10. Saudari Wildayanti yang siap mendengar keluh kesah terkait skripsi
11. Teman-teman mahasiswa seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kelas D Angkatan 2018 atas

segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2022


Nining



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Teori Dan Konsep Pembangunan Infrastruktur.....	12
1. Teori Administrasi Pembangunan.....	12
2. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	18
3. Konsep Pembangunan Infrastruktur.....	25
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Informasi Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33

F. Teknik Pengabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
1. Profil Desa Patongloan.....	36
2. Jumlah Penduduk.....	36
3. Visi dan Misi Desa Patongloan.....	38
4. Tingkat Pendidikan Dan Mata Pencaharian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	45
a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.....	45
1. Pembangunan infrastruktur anggaran Tahun 2019-2021.....	47
b. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	
1. Partisipasi Pikiran (<i>psychological Participation</i>).....	53
a. Partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG.....	54
b. Partisipasi masyarakat dalam RPJMDes.....	56
2. Partisipasi Tenaga (<i>physical Participation</i>).....	59
3. Partisipasi Keahlian (<i>participation with skill</i>).....	62
4. Partisipasi Barang (<i>Material Participation</i>).....	65
5. Partisipasi Uang (<i>Money Participation</i>).....	67
C. Hasil Pembahasan.....	71
1. Partisipasi Pikiran (<i>psychological Participation</i>).....	72
2. Partisipasi Tenaga (<i>physical Participation</i>).....	73
3. Partisipasi Keahlian (<i>participation with skill</i>).....	73
4. Partisipasi Barang (<i>Material Participation</i>).....	74
5. Partisipasi Uang (<i>Money Participation</i>).....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Patongloan.....	39
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.4 Jenis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa Patongloantahun Tahun 2019-2021.....	46
Tabel 4.5 Dana Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2019-2021.....	50
Tabel 4.6 Data Pengelompokan Masalah Pembangunan Infrastruktur.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	39



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self government.

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peran pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil pembangunan secara optimal. Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Pembangunan dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wujud pengakuan Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun superstruktur, dan

membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Patongloan adalah perbaikan jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumahrumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Patongloan Kepala Desa Patongloan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur perbaikan jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan

Pembangunan Infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belum diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan. Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Namun kenyataan yang ada pembangunan infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan Undang-Undang yang di terapkan. Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan pedesaan kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi pembangunan daerah, kesejahteraan daerah sesungguhnya apa yang dirasakan masyarakat di desa, bilamana masyarakat pada tingkat desa belum memperoleh kesejahteraan maka suatu daerah kabupaten dan kota belum dapat dikatakan telah sejahtera. Melalui asas otonomi daerah, konsentrasi pembangunan terarah pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam lingkup kabupaten tersebut terdapat unit pemerintahan kecil yang bersinggungan langsung kepada masyarakat di pedesaan yaitu pemerintahan desa.

Proses demokratis di indonesia diharapkan mampu mengikutsertakan dan memaksimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terlebih yang langsung berkenan dengan mereka, seperti program-program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini seperti yang dikutip oleh Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan Kembali keseluruhan system ekonomi

dan sosial. Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif meliputi partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, partisipasi uang.

Ditinjau dari akhir tahun 2019-2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia Ketika tiba-tiba muncul sebuah wabah covid-19 yang awal mulanya muncul secara lokal di wuhan-china pada akhir 2019, lalu merembak keseluruhan bagian negara-negara di dunia yang memporak porandakan sendi perekonomian di dunia terkhusus di negara indonesia ini. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan terkhusus di desa Patongloan, virus covid-19 telah membuat aspek-aspek kehidupan melemah terkhusus aspek pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang mengakibatkan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan akibat adanya refocusing anggaran untuk penangana covid-19 itu sendiri.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembanguana yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan yang diharapkan. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang berada dilingkungan sekitar. Karena pemerintah sampai saat ini tidak melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan infrastruktur.

Observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa yang terjadi di desa Patongloan dimana program pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif tidak berjalan sesuai dengan keadaan dilapangan. Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur di desa patongloan tersebut sangatlah kurang maka dari itu masyarakat harus dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan tersebut.

Strategi pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat kurang terjalin sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyalurkan aspirasi secara langsung yang mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan masing-masing.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi kesalahan fahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat.

4. Meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna Infrastruktur Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pembanguna infrastruktur Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dengan penelitian ini peneliti sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Secara praktis adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna penetapan konsep selanjutnya, khususnya dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi diperguruan tinggi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikutip dari beberapa jurnal dan skripsi:

- a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa), Nurwanda (2016). Dalam penelitian ada beberapa indikator yang digunakan sebagai bahan fokus penelitian dalam menerapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik yaitu: a). Partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran. b). Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. c). Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian. d). Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. e). Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau dana.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Hayati (2017). Dalam penelitian menjelaskan tentang analisis
- c. Partisipasi masyarakat dalam infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng Rappang, Ltif et al., (2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng Rappang dalam pembangunan fisik sudah sangat baik dengan indikator persentase yang telah disebutkan.

Adapun perbedaan yang dapat diuraikan dengan bentuk table diatas adalah:

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Penelitian

No	Judul penelitian dan nama penelitian	Metodologi	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa) Nurwanda, (2016)	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sudah dilaksanakan secara keseluruhan	Lokasi penelitian serta analisis data
2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Hayati (2017).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi penelitian kualitatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan infrastruktur di desa tersebut sudah cukup baik dengan kontribusi dari masyarakat	Lokus Penelitian
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Ltif et al.,(2019).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi penelitian kuantitatif	Tingkat partisipasi masyarakat di desa tersebut dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik.	Lokasi penelitian metode penelitian yang digunakan

dari masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti gotong royong pembangunan jalan tani.

B. Teori Dan Konsep Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Teori Administrasi Pembangunan

a. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan belum diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Saat ini perkembangan menuju kearah itu terlihat sebagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan berkembang berdasarkan disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Siagian (2009:5) mendefenisikan adminitrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara Bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara Bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Siagian, dalam Luthfi merumuskan pengertian administrasi pembangunan sebagai berikut: Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Mostopadidjaya dalamafifudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat diphami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Pembangunan adalah perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan desa berpijak kepada pembangunan masyarakat yang diharapkan mampu memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri, Orocomna (2004).

Menurut Adisasmita (Rahman, 2016), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dari masyarakat pada keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Menurut Todaro (Maripah, 2017), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dari keuangan dari kehidupan manusia. Menurut Ginandjar Kartasmita (Hayati, 2017), menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu diantaranya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.

Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional,

mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Nain (2019). Pembangunan dapatlah dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, Pengemanan (2017).

Pembangunan memerlukan perencanaan karenan kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang etrsedia dan mengembangkan potensi yang ada, Suwandi & Rostyaningsih (2012).

Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga

dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.

Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers (2012), yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

1. Ciri – Ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian(2014), yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebuah program terencana yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi keterbelakangan kemiskinan yang dengan demikian pembangunan ini dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

a. Prinsip-prinsip pembangunan

Menurut Solaeman (Zamhariri, 2008), pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Transparansi (akuntabilitas)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri, Haliim (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan pemerintah desa yang partisipatif, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab dan transparan, Rahman (2016).

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tubuhnya rasa memiliki dan bertanggung jawab dengan program yang dilakukan, Maripah (2017).

Menurut Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati (2019), Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dua pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sastropetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan

ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari sekedar kegiatan fisik semata,Minahasa (2007).

Menurut Conyer Diana (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Masyarakat akan mengetahui seluk beluk dari program pembangunan dan akan merasa memiliki terhadap pembangunan tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa masyarakat memiliki suatu hak demokrasi bilamana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan aspirasi untuk menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan.

Dari segala pendapat yang ada mengenai partisipasi masyarakat dapat ditarik benang merah bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk memberikan tenaga dan tenaga baik secara berkelompok maupun perindividu dalam suatu kegiatan baik formal maupun nonformal serta harus di dukung dengan kesadaran dari dalam dirinya ataupun dorongan dari orang lain untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi.

a) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Jumrowi yang dikutip Suryosubroto (2002:287) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*psychological participation*)

Pikiran atau gagasan yang bersumber dari masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk masukan atau usulan yang berharga bagi terwujudnya suatu proses pembangunan infrastruktur baik berupa pembangunan jalan, beton, pengaspalan dan lainnya. Partisipasi pikiran tidak sebatas memberi gagasan terhadap pembangunan fisik melainkan sebuah saran atau usulan yang berharga ke pemerintah desa dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tenaga (*physical participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menyumbangkan atau memberikan kontribusi tenaga sebagai bentuk sumbangan swadaya dari masyarakat. Komitmen ini sebagai kesepakatan dari pemerintah desa dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok.

3. Keahlian (*participation with skill*)

Partisipasi keahlian sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk memberikan keterampilan dibidangnya. Partisipasi keahlian merupakan keterampilan yang dilakukan melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Barang (*material participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan atau memberikan alat dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna untuk memperlancar proses pengerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri.

5. Dana (*money participation*)

Peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa uang sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk materi. Walaupun prosesnya bisa secara tidak langsung, namun implikasinya bisa dapat mewujudkan suatu hasilnya berupa yang dapat menunjang pembangunan infrastruktur.

Mubyanto dalam ndraha (1990:102-104) bahwa cdalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.

- a. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.
- b. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.
- c. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta adil dalam sebua pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunana.
- d. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.
- b. Tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Tjokmidrojo (1998-104) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Partisipasi dalam keterlibatan dalam proses penentuan arah.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab.
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara keadilan.

b) Macam-macam partisipasi masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (Irene, 2015:61) partisipasi dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata-kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh untuk mengetahui apakah pelaksanaan program secara menyeluruh untuk mengetahui apakah pelaksanaan program yang telah direncanakan berjalan sebagaimana dengan struktur yang telah direncanakan.

c) Manfaat dan fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Carter (Suntoso, 2005:2) menyebutkan bahwa fungsi dari masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- c. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sangketa
- d. Partisipasi masyarakat sebagai terapi

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- b. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- c. Meningkatkan proses belajar
- d. Meminimalisir perasaan terasing
- e. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- f. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Menurut Santoso Sastropetro (1998) faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- b. Faktor kesadaran atau kemauan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk ikut berpartisipasi, salah satu diantaranya yaitu faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri
- c. Adanya partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat. Apalagi yang memulai adalah pemimpin. Sehingga keikutsertaan

mereka bukan karena dorongan hati Nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

- d. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, Pemerintah selaku pengembang amat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan saha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai control sosial ditengah masyarakat.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menurut santoso Sastropetro (1998) yaitu:

- a. Rendahnya kualitas Pendidikan

Sarana Pendidikan masyarakat cenderung rendah. Masyarakat didesa umumnya hanya berpendidikan SD,SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar Pendidikan untuk dirinya. Dari hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya Pendidikan. Rendahnya Pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan

bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka.

Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi bangsa dimasa akan datang. Ini menjadikan kendala dalam penetapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Oleh karena itu masyarakat harus di ingatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan dengan memperbaiki sarana Pendidikan.

b. Tingkat pendapatan rendah

Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan, ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena terfokus pada pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan

c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian.

3. Konsep Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada system fisik yang mnjadikan transpotrasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas public yang lain dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingku sosial dan ekonomi. Pada dasarnya pelaksanaan infrastruktur dilaksanakan oleh masing-

masing individu. Sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, Kogoya et al., (2015).

Berbagai program pengembangan pembangunan telah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang meliputi pembangunan infrastruktur pedesaan, perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menurut Hadi (2015), konsep dari pembangunan yang partisipatif ini meliputi tiga unsur, yaitu:

1. Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan serta evaluasi pembangunan.
2. Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

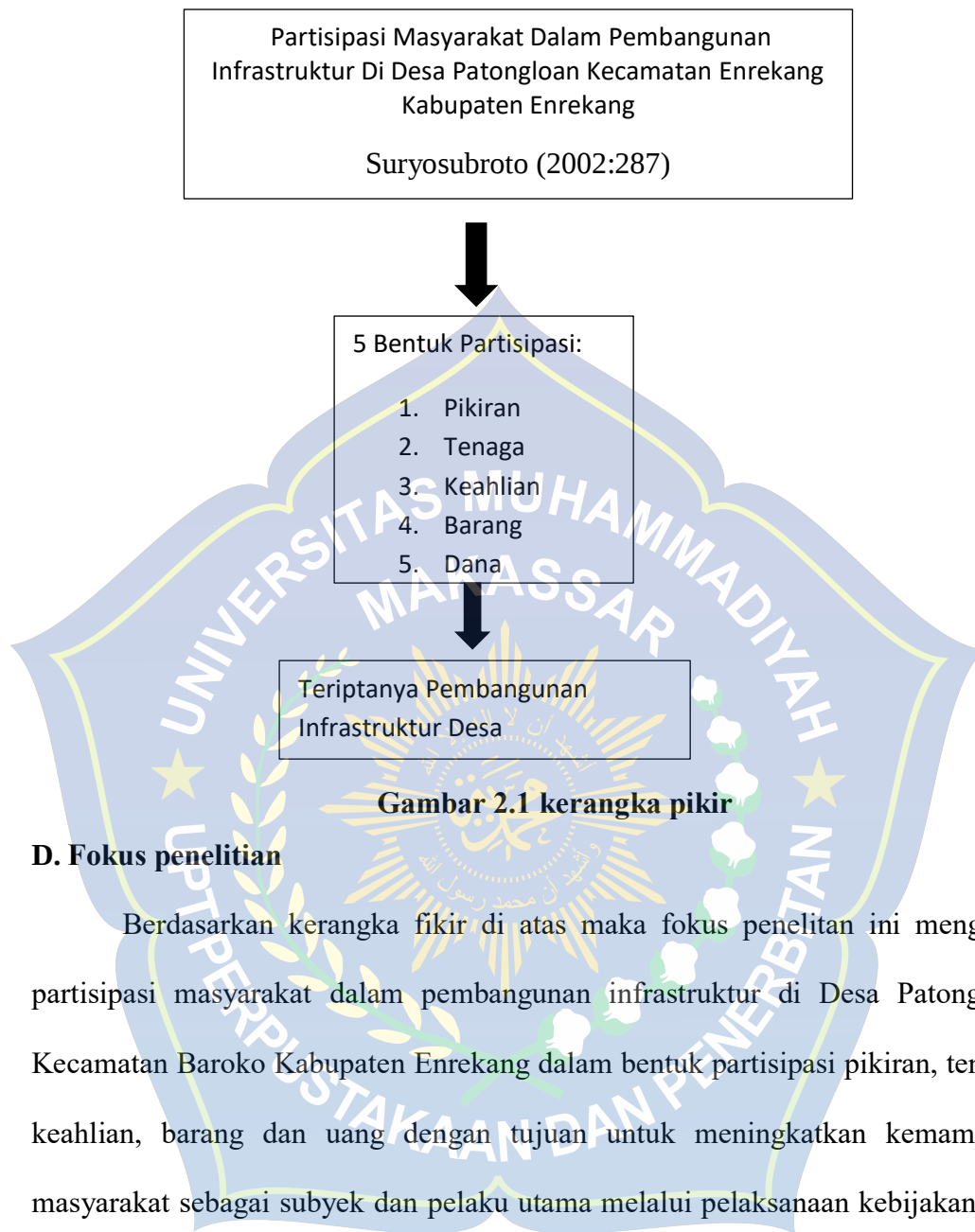
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang sebagai proses dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain:

1. Pembangunan akan lebih mekar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin.
2. Pembangunan menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung Sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut

3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri. (Kogoya et al., 2015)

C. Kerangka pikir

Partisipasi merupakan ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan infrastruktur Desa Patongloan melibatkan kepala desa dan masyarakat desa untuk terjadinya perubahan yang diinginkan dan meningkatkan taraf hidup Masyarakatnya. Kepala desa dan masyarakat desa sangat penting untuk menjalin komunikasi dalam partisipasi pembangunan infrastruktur desa Patongloan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan keaktifan waktu serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangkai menyumbangkan ide kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



D. Fokus penelitian

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka fokus penelitan ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam bentuk partisipasi pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama melalui pelaksanaan kebijakan dari program pembangunan.

E. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*) adalah keikutsertaan masyarakat untuk memberikan sebuah gagasan atau ide sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik.
2. Partisipasi Tenaga (*Physical participation*) adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan energi secara individu atau kelompok pada saat proses pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.
3. Partisipasi Keahlian (*participation with skill*) adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsi berupa keterampilan yang dimiliki berdasarkan kemampuan atau keahlian pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berlangsung.
4. Partisipasi Barang (*Material Participation*) adalah partisipasi masyarakat berupa barang atau alat yang bisa digunakan dalam menunjang proses pembangunan infrastruktur.
5. Partisipasi Dana (*Money participation*) adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa uang, iuran, dana atau proses pengajuan-pengajuan yang terprosedur untuk mendapatkan dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian berlangsung 2 (dua) bulan mulai dari bulan April-Mei dan tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat dilingkungan Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Peneliti melakukan penelitian disalah satu desa yaitu Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, karena di Desa Patongloan tersebut masih mengalami partisipasi dalam pembangunan yang masih kurang dan tidak sesuai yang di inginkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan peristiwa yang benar-benar terjadi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa patongloan kecamatan baroko kabupaten enrekang. Oleh sebab itu pendekatan kualitatif ini yaitu dengan menggabungkan dan mencocokkan antara peristiwa yang terjadi dengan teori yang berlaku.
2. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek penelitian selama penelitian berlangsung.

C. Informasi Penelitian

Dalam penelitian, peran informasi sangat penting dan perlu. Penentuan narasumber dalam penelitian ini untuk di wawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Peneliti ini terdapat informan yaitu:

Table 3.1 data Informasi Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Atto Sainal	AS	Kepala Desa	1
2.	Amrullah Ballohe	AB	Sekretaris	1
3.	Liyana	LA	Anggota BPD	1
4.	Muliati	MI	Masyarakat	1
5.	Mardan	MN	Masyarakat	1
6.	Liyana	LA	Masyarakat	1
Jumlah				6

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan pengawasan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian, observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh makna yang rasional dengan melakukan percakapan secara berhadapan langsung (*face to face*) dengan informan kegiatan ini dilakukan secara santai namun sistematis, dimana informan dapat mengungkapkan ide, pandangan dan perasaan secara natural.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal sehingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat di olah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek peneliti maupun informasi peneliti untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan merekam semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran lebih jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

2. Penyajian Data (data display)

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, dengan hubungan, antara kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan mudah menjelaskan mengenai hasil yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing and verification)

Langkah ke tiga dari analisi dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kreadibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:125) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut sugiyono (2017:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang mana dengan Teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila Teknik pengujian kreadibilitas data tersebut mrnghasilkan data yang berbeda beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda beda.

3. Triangulai Waktu

Data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kreadibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Desa Desa Patongloan

Desa Patongloan merupakan bagian dari daerah Kabupaten Enrekang yang senantiasa mengambil bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan Baroko baik sebagai subjek maupun objek pada tingkat desa yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang terus berkelanjutan demi masa depan Kabupaten Enrekang pada umumnya.

Desa Patongloan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Baroko dan berada dibagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Patongloan dari Ibukota Kabupaten Enrekang 48 Km. Desa ini memiliki luas wilayah 6,0 Km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan pertanian, dan hutan. Desa Patongloan terbagi atas 4 dusun yakni Dusun Redak, Dusun Rantebaba, Dusun Korang, dan Dusun Leme'. Batas-batas wilayah Desa Patongloan yakni sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Benteng Alla Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benteng Alla
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benteng Alla/Garassik Tator
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benteng Alla Utara

2. Jumlah Penduduk di Desa Patongloan

Penduduk dari Desa Patongloan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berjumlah 1.250 jiwa sedangkan

tahun 2021 tercatat 1.450 jiwa. Jumlah penduduk terbesar yakni 373 jiwa yang mendiami Dusun Rantebaba pada tahun 2020 dan jumlah penduduk paling rendah berada pada Dusun Tanete yakni 233 jiwa per tahun 2020.

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di Desa Patongloan lebih sedikit di banding dengan jumlah penduduk perempuan untuk pertahunnya. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki yaitu perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki penduduk Desa Patongloan sebanyak 621 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 629 jiwa. Jumlah penduduk Desa Patongloan dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis Kelamin tiap dusun di Desa Patongloan, 2020 sampai 2021

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Dusun Redak	181	167	348
2. Dusun Rantebaba	169	204	373
3. Dusun Korang	154	142	296
4. Dusun Leme'	117	116	233
Jumlah	2021	720	730
	2020	621	629
			1.450
			1.250

Sumber: Badan Statistik Kecamatan Baroko

3. Visi dan misi Desa Patongloan

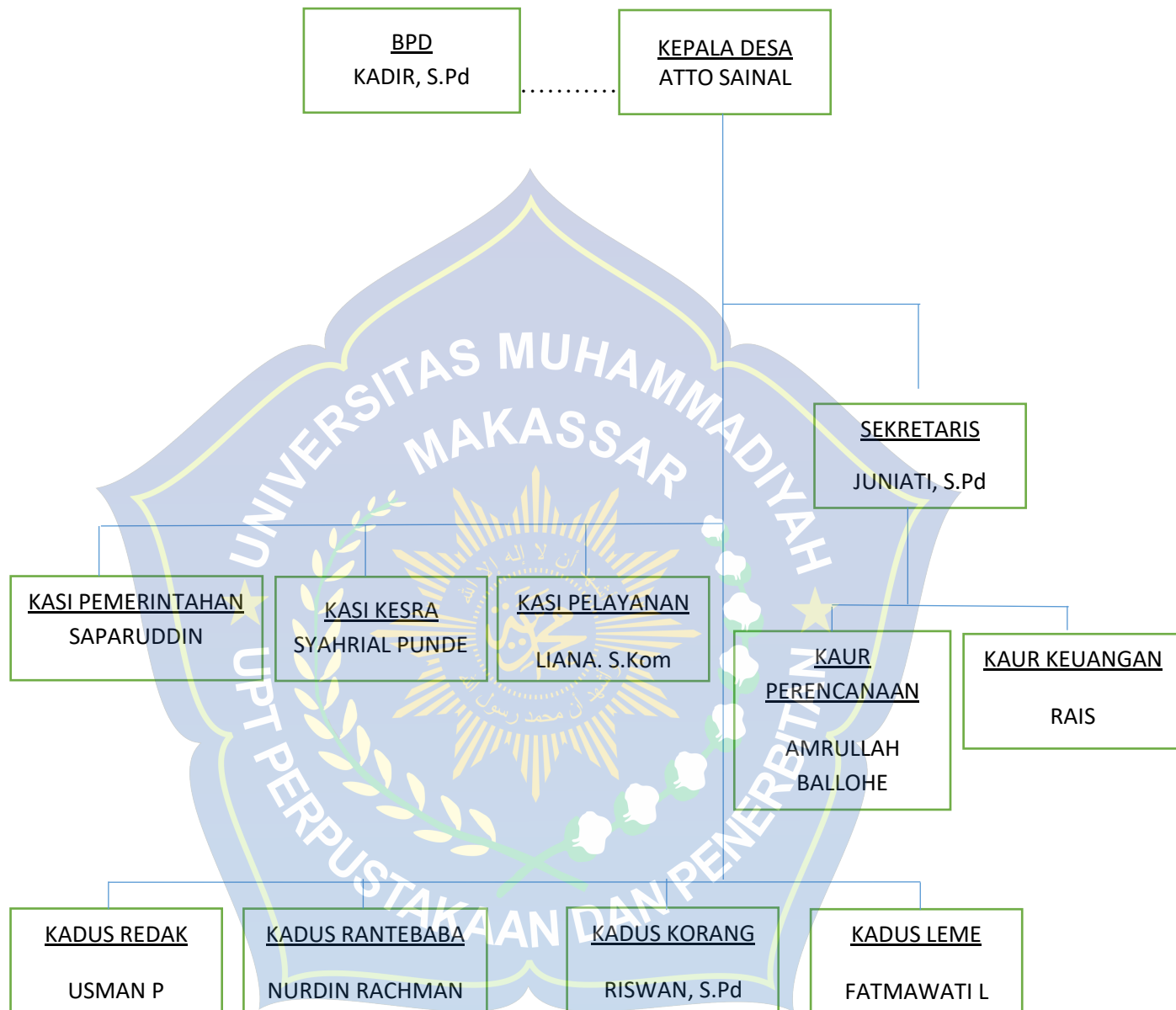
a. Visi

“Membentuk masyarakat Patongloan selalu dalam persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan Patongloan maju, aman, sejahtera (PAMMASE) menuju adil dan makmur ”

b. Misi

1. Mewujudkan Patongloan bersama untuk membangun sesuai dengan sarana dan prasarana yang telah ada (transportasi, perkebunan, dan pertanian)
2. Merencanakan dan melaksanakan patongloan bersama tokoh masyarakat dan pemuda tanpa tanpa melupakan etika dan budaya adat yang telah dimiliki masyarakat
3. Mengembangkan sumber daya dan potensi warga masyarakat dalam pelayanan sesuai bakat dan profesinya
4. Peningkatan pelayanan desa dalam kesehatan, Pendidikan, seni budaya dan keolahragaan

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Struktur organisasi pemerintahan desa Patongloan:

1. Kepala Desa
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Sekretaris Desa
4. Pelaksana teknis desa terdiri dari:

- a. Kepala urusan keuangan
 - b. Kepala urusan administrasi
 - c. Kepala urusan umum
 - d. Kepala urusan pemerintahan
 - e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
5. Kepala kewilayaan
- a. Kepala Dusun
1. Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 yaitu memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang tahun 1945 serta memopertahankan dan memelihara keutuhan negara republik indonesia dan bhineka tunggal ika. Pemerintah desa melaksanakan fungsinya:
- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - e. Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah Lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

BPD menyelenggarakan fungsinya:

- a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
3. Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Sekretaris desa menyelenggarakan fungsinya:

- a. Menyelenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- d. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada seorang kepala desa
4. Pelaksana teknis
 - a. Kepala urusan keuangan untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APBD serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Kepala urusan keuangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Mengelola administrasi keuangan desa
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes
3. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

- b. Kepala urusan administrasi membantu sekretaris desa dalam melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa.

Kepala urusan administrasi menyelenggarakan fungsinya:

1. Melakukan administrasi surat menyurat serta pelayanan umum
2. Melaksanakan tugas administrasi kearsipan, dokumentasi data dan kepustakaan.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpung dan mengelola serta menyajikan data-data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya
4. Melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas

- c. Kepala urusan umum untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat laporan.

Kepala urusan umum menyelenggarakan fungsinya:

1. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan untuk desa
 2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
 3. Pengelolaan administrasi perangkat desa
 4. Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang ada di kantor.
- d. Kepala urusan pemerintahan untuk membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- Kepala urusan pemerintahan menyelenggarakan fungsinya:
1. Melaksanakan administrasi kependudukan
 2. Administrasi pertanahan
 3. Melaksanakan pencatatan monografi desa
 4. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertanahan sipil di pedesaan.
- e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsinya:

1. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
2. Melaksanakan program program perkembangan kehidupan beragama
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program-program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

4. Tingkat Pendidikan dan mata pencaharian di desa

Tingkat pendidikan penduduk di desa Patongloan masi rendah dimana masyarakat kebanyakan hanya berpendidikan SD,SMP,SMA. Hal ini di sebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Ini menyebabkan mereka hanya bergelut di lingkak kemiskinan karena minimnya pendidikan dan rendahnya pendapatan.

Mayarakat hanya memikirkan bagaimana cara mempertahankan hidup tanpa memikirkan generasi nasib penerus bangsa dimasa yang akan datang, minimnya pendidikan masyarakat menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% bermata pecaharian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi kendala dalam penerapan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan di desa Patongloan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	20 Orang
2.	SD	135 Orang
3.	SMP	358 Orang
4.	SMA	365 Orang
5.	Perguruan Tinggi	183 Orang

Sumber: *data tingkat pendidikan desa Patongloan*

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di desa Patongloan masih sangat rendah dimana masih banyak masyarakat yang bahkan tidak tamat sekolah dasar sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan infrastruktur mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan dan lebih menyerahkan kepada pemerintah sepenuhnya. Karena masyarakat akan lebih terfokus kepada pekerjaan masing-masing.

B. Hasil Pembahasan

a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

2. Pembangunan infrastruktur Tahun 2019-2021

Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari proses perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis masalah dan perumusan masalah yang tepat. Dalam perumusan masalah ini perencanaan harus berasal dari bagaimana kita memiliki keinginan untuk keluar

dari permasalahan yang ada dan mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang kita inginkan dan dapat dicapai secara rasional.

Perencanaan bersama masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang paling mendasar untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Sebagaimana dikutip dari teori Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati, 2019) bahwa masyarakat harus ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan upaya mengenai masalah dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan keadaan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Masyarakat harus mampu memberikan aspirasi mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok yang didukung dengan kesadaran diri sendiri maupun dorongan orang lain. Adapun pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Patongloan pada tahun 2019-2021:

Tabel 4.4 jenis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan

No	Jenis pembangunan infrastruktur
1.	Rabat jalan beton
2.	Drainase
3.	Jamban RTM

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur didesa Patongloan pada tahun 2019 sampai 2021 yaitu pembuatan jalan beton berupa jalan tani dan jalan desa yang bertujuan untuk mempermudah akses jalan warga, memperlancar aktivitas warga dan antar desa, sebab akses jalan menjadi faktor penting dalam distribusi hasil pertanian dan produksi batu bata mengingat mayoritas warga di desa Patongloan adalah petani. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah dari suatu tempat yang digunakan untuk mengalirkan resapan air hujan di lingkungan warga menuju ke badang sungai yang terdekat. Jamban RTM adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Penggunaan jamban tidak hanya nyaman melainkan juga turut melindungi dan meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat di Desa Patongloan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini berlangsung dari tahun 2019 sampai 2021. Namun pada akhir tahun 2019 ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda karena adanya wabah virus covid 19 kemudian dikerjakan kembali setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan.

Seperti hasil Wawancara dengan kepala desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“pembangunan infrastruktur di desa Patongloan mulai tahun 2019 sampai saat ini yaitu kebanyakan perbaikan jalan beton, Jamban RTM dan Drainase. Namun karena adanya wabah covid 19 pada akhir 2019 pembangunan infrastruktur sempat terhenti kemudian dilanjutkan Kembali setelah adanya arahan dari pemerintah untuk melanjutkan Kembali pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti beberapa saat”. Hasil wawancara dengan AS, 9 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan berupa perbaikan jalan, pembuatan jalan beton, pembuatan Jamban RTM dan pembuatan Drainase. Namun pembangunan infrastruktur tersebut sempat terhenti karena adanya wabah covid 19, kemudian dilanjutkan Kembali setelah adanya informasi dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti.

Senada dengan wawancara anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“pembangunan infrastruktur yang ada di desa Patongloan ada beberapa yang sebelumnya sudah direncanakan tetapi yang terealisasi hanya beberapa saja seperti pembuatan jalan beton di beberapa lorong masuk ke permukiman warga serta pembuatan jamban RTM dan pembuatan Drainase di setiap dusun. Tetapi ada juga pembangunan infrastruktur yang belum sempat dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 sehingga pembangunan infrastruktur dihentikan sampai adanya informasi dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti. Hasil wawancara dengan LA 10 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di desa Patongloan yang hanya terealisasi dengan baik hanya ada beberapa seperti pembuatan jalan beton, pembangunan jamban RTM dan pembuatan drainase. Tetapi rencana yang telah disepakati sebelumnya terkendala karena adanya wabah covid 19 yang berdampak pada proses pembangunan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur tertunda akibat dampak covid 19 tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“yang saya amati dan saya rasakan pembangunan pembangunan fisik di desa Patongloan itu kebanyakan perbaikan jalan yang rusak, lalu pembuatan jamban RTM dan Drainase juga”.(Hasil wawancara dengan MI 11 April 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di desa Patongloan adalah pembuatan jalan beton untuk mempermudah warga yang tinggal di lingkungan yang padat akan rumah penduduk sekitar dan pembangunan jamban RTM disetiap dusun dan pembuatan Drainase.

Pembangunan infrastruktur dikelola berdasarkan perolehan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa merupakan dana hasil implementasi dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan pengelolannya oleh negara kepada desa untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan daerah. Berikut penggunaan rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur 2019 sampai 2021.

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2019-2021

Tahun	Kegiatan	Lokasi	Total anggaran	Sumber
2019	Pembuatan batas Dusun	Dusun Leme'	33.187.000	Dana Desa
	Pembuatan Talud Depan Kantor Desa	Dusun Rantebaba	60.750.600	
	Pengerjaan Plat Duicker (1x6m)	Dusun Redak	14.372.00	
	Pengerjaan Jalan Beton (190 m)	Dusun Korang	165.327.00	
	Pengerjaan Jalan Beton (135 m)	Dusun Redak	135.789.000	
2020	Pekerjaan Drainase (60 m)	Dusun Redak	70.896.000	APBD
	Pembuatan Batas Dusun	Dusun Redak	32.476.000	
	Pengerjaan Jalan Beton (150 m)	Dusun Rantebaba	157.573.000	
	Pengerjaan Jalan Beton (145 m)	Dusun Korang	169.700.000	
2021	Sirtu Dusun Rantebaba (228x4)	Dusun Rantebaba	75.535.000	ADDS
	Pembuatan Jalan Beton (45 m)	Dusun Redak	25.598.000	
	Rumah Data Kantor Desa	Kantor Desa	36.985.000	

Sumber: RAP tahun 2019-2020 desa Patongloan

Dari data di atas menunjukkan bahwa rencana anggaran dana desa bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Alokasi Dana Desa Swadaya (ADDS). Semua sumber pendapatan yang

diterima oleh desa harus digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, salah satunya pembangunan infrastruktur. Proses pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan partisipatif sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa akan ditentukan oleh desa sejauh mana peran serta masyarakat desa dalam memberikan aspirasi untuk melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi pembangunan tersebut.

Selain pembangunan desa akan ditentukan sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yaitu: transparansi, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan desa.

Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan dengan proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap-tahap berdasarkan proses pencairan anggaran dan ini melalui proses musyawarah pembangunan, tapi untuk tahun ini karena terdampak pandemi covid-19 adanya potongan anggaran atau refocusing tergantung oleh tingkat urgensi atau kebutuhannya maka anggaran tersebut disesuaikan dengan skala prioritas tingkat kebutuhan yang mendesak dan ini disetujui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan”. (Hasil wawancara dengan AB, 11 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable), proses pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan

pencairan dari anggaran yang ada untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Namun karena adanya wabah pandemi covid-19 ini ada pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19.

Senada dengan pendapat kepala desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Di lihat dari keadaan perekonomian sekarang akibat adanya wabah virus corona atau covid-19 ada pemotongan anggaran untuk penangan covid-19 berupa bantuan kepada masyarakat seperti BLT,BST, dan lain sebagainya dan ini sudah direncanakan sebelumnya dan ini salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dibidang perekonomian karena semua orang terdampak.” (Hasil wawancara AS, 15 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemotongan anggaran ini dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang paling terdampak akibat pandemic covid-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini pembuatan kebijakan akan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sempat tertunda dengan perencanaan sebelumnya akibat adanya pemotongan anggaran.

Dari beberapa wawancara diatas mengenai pembangunan infrastruktur dan anggaran yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pembangunan yang ada di desa Patongloan baik sarana dana prasarana yang dapat digunakan masyarakat desa setempat untuk kesejahteraan yang dikelola dengan menggunakan beberapa jenis sumber anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari anggaran dana des aitu sendiri guna menunjang keberhasilan penggunaan infrastruktur itu sendiri.

b. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangun infrastruktur di Desa Patongloan

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*)

Partisipasi pikiran merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut dalam menganalisis permasalahan, lalu merumuskan masalah yang terjadi dalam lingkungan desa.

Beberapa tahap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan pembangunan melalui musrembang, dengan adanya musrembang ini masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di desa Patongloan yang diwakili oleh beberapa perwakilan dari para pemangku kepentingan stakeholder baik itu dari kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Ketua Remaja dan LSM. Melalui perwakilan ini mereka diharapkan membawa inspirasi, pikiran, dan masukan berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap dusun, kelompok, Lembaga dan lainnya. Dalam proses perumusan masalah ini ada beberapa tahap dalam pelaksanaannya, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Adapun partisipasi pikiran yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa yaitu :

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di desa Patongloan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi untuk memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Kemudian permasalahan yang telah didiskusikan secara musyawarah mufakat akan di usulkan kepada pemerintah melalui badan pengawas desa (BPD) berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.

Fokus utama dari pembahasan musrembang adalah fokus pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Lembaga publik yang pemerintah desa harus mampu bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan serta kemajuan desa, dengan cara memotret potensi desa dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik di dalam desa maupun diluar desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi media pemerintah untuk melibatkan semua kalangan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak adanya, disamping untuk merangkul tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan dijalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu masyarakat desa setempat yang mengatakan bahwa:

“kadang saya tidak sempat ikut berpartisipasi karena adanya beberapa kendala pekerjaan yang mengakibatkan saya tidak bisa ikut pada proses pengambilan keputusan pada saat proses perumusan masalah yang terjadi dilingkungan setempat.” (Hasil wawancara dengan MN, 20 April 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat terkadang tidak bisa ikut berpartisipasi pada saat perumusan masalah yang terjadi dilingkungan setempat karena adanya beberapa kendala masalah pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi pada proses tersebut.

Tambahan wawancara dengan anggota BPD (Badan Pengawas Desa) yang mengatakan bahwa:

“Pada saat proses pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi di beberapa dusunnya, hanya diwakili oleh beberapa orang seperti kepala Dusun ataupun tokoh masyarakat yang sempat hadir untuk proses pengambilan keputusan tersebut, kemudian permasalahan yang telah dibicarakan bersama dipertimbangkan Kembali untuk dalam musrembang agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan”. (Hasil wawancara dengan LA, 21 April 2022).

Wawancara diatas diketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi harus dipertimbangkan Kembali berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar masalah yang terjadi bisa ditangani dengan bijak oleh pemerintah.

Proses pembuatan keputusan atau perumusan masalah mengenai pembangunan dimana masyarakat memberi pemikiran berupa saran, kritik maupun masukan yang dapat ditampung dan diterima sebagai suatu aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang mewakili memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

b. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam proses perencanaan pembangunan yang baik pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan partisipatif dalam proses perencanaan sesuai dengan amanah undang-undang desa. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan suatu kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di desa Patongloan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemic covid-19. Berikut daftar masalah yang di bahas dalam pelaksanaa RPJMDes yaitu:

Tabel 4.6 Daftar pengelompokan masalah

No	Masalah
1.	Terdapat jalanan utama sekitar 900 meter di Dusun Rantebaba, lanjutan jalan yang telah di cor beton masih dalam kondisi rusak
2.	Terdapat satu lorong yang mengelilingi Dusun Redak sekitar 600 meter masih dalam kondisi licin pada saat musim hujan karena jalanan tersebut masih terbuat dari batu-batu belum dicor beton
3.	Terdapat suatu perkampungan yaitu di Dusun Korang yang masih belum memiliki jalan tani maupun jalan desa sepanjang 1200 meter sehingga warga sulit untuk menjangkaunya
4.	Terdapat jalan yang menghubungkan Dusun Rantebaba dengan Dusun Leme' masih dalam kondisi rusak sekitar 300 meter
5.	Terdapat jalanan sekitar 350 meter di Dusun Redak yang sering menjadi jalur distribusi angkutan sayur yang terhubung dengan Desa Benteng Alla Utara dalam kondisi becek dan berlubang yang
6.	Perlu pembuatan jalan di Dusun Korang sepanjang 500 meter karena banyak permukiman warga yang terdapat di tengah-tengah perkampungan Dusun Korang
7.	Perlu pengerjaan Drainase di sekeliling Desa Patongloan

Dari tabel pengelompokan masalah diatas dapat diketahui bahawa di desa Patongloan masih banyak masalah yang harus cepat ditangani oleh pemerintah untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Perencanaan yang baik dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula.

Berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Pada proses perencanaan RPJMdes tidak semua lapisan masyarakat ikut dilibatkan hanya ada beberapa orang yang terkait atau diwakilkan kepada pihak yang terkait seperti stekholder, BPD, kepala Dusun dan para tokoh masyarakat apalagi ini dalam masa pandemi covid-19 yang dimana harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintahan pusat. Dari para pihak yang diwakilkan ini diharapkan membawa beberapa aspirasi dari masyarakat mengenai masalah yang terjadi di lingkungan Desa Patongloan untuk dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan untuk mencapai pembangunan desa yang berkualitas.”
(Hasil wawancara dengan AS, 22 April 2022)

Sependapat dengan anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Memang tidak semua lapisan masyarakat Kembali dilibatkan dalam pertemuan atau rapat seperti RPJMDes dengan pertimbangan masyarakat memiliki kesibukan masing-masing. Kalau ada bentuk penyampaian aspirasi bisa melalui anggota kami ataupun para perwakilan masyarakat lainnya untuk disampaikan Kembali”.(Hail wawancara dengan LA, 24 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses perencanaan RPJMDes di Desa Patongloan tidak semua lapisan atau kalangan masyarakat diundang unruk mengikuti proses RPJMDes hanya beberapa orang yang terkait seperti para stekholder, BPD, Kepala Dusun, dan para tokoh masyarakat lainnyadengan mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dimasa pandemic covid-19 untuk mencegah dari wabah virus.

Tambahan wawancara dengan sekretaris Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Secara administrasi kami sudah berusaha mengundang semua lapisan masyarakat yang terkait untuk mengikuti semua penyusunan RPJMDes untuk menyampaikan aspirasi tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat hadir karena adanya beberapa faktor atau kendala dari kesibukan sehingga mereka tidak sempat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut”.(Hasil wawancara dengan AB, 26 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya diwakili oleh beberapa pihak yang terkait sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan oleh aspirasi yang di bawah pihak tersebut, dalam proses perumusan masalah seharusnya masyarakat harus mampu untuk ikut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan solusi dari masalah yang mendesak.

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab II Menurut Sastropetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari sekedar kegiatan fisik semata. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan perumusan masalah terhadap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan cita-cita

kelompok yang hendak dicapai. Sedangkan, menurut Isbandi Rukminto Adi mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dua pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Perencanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan oleh semua masyarakat. Pada dasarnya pembangunan yang partisipatif harus mampu menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang merata secara berkeadilan.

2. Partisipasi Tenaga (*physical participation*)

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa terutama di bidang infrastruktur dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana diberikan oleh masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau program pembangunan berupa tenaga atau dapat di sebut gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangsi berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan desa Patongloan tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah.

Seperti wawancara oleh kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama dalam lingkungan desa Patongloan ini, karena ini dapat meringankan atau mempercepat kegiatan pelaksanaan pembangunan seperti pembuatan pembangunan jalan dan drainase, masyarakat bisa bergotong royong untuk membersihkan saluran untuk mempercepat pembangunan tersebut namun harus mengikuti aturan protokol kesehatan di masa pandemic covid 19 ini.”(Hasil wawancara dengan AT, 28 April 2022).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi memberikan tenaga berupa gotong royong untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat untuk umum atau masyarakat setempat. Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini masih kurang atau tidak maksimal.

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris desa yang mengatakan:

“Memang betul saya melihat tidak semua masyarakat turun langsung kelokasi untuk memberikan sumbangsi berupa tenaga atau ikut bergotong royong untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, mungkin karenan pekerjaan yang mayoritas masyarakat disini adalah pencetak batu bata sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi”.(Hasil wawancara AB, 30 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsi tenaga berupa gotong royong ataupun kerja bakti masih sangat minim atau kurang maksimal karena adanya suatu pekerjaan yang

mayoritas masyarakat desanya adalah pencetak batu bata sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Saya pada saat proses pelaksanaan pembangunan tidak bisa ikut terlibat memberikan tenaga atau bergotong royong karena suatu pekerjaan yang bertepatan dengan proses pengerjaan pembangunan jadi saya lebih memilih untuk meneruskan pekerjaan karena saya juga menganggap pasti pemerintah sudah memfasilitasi program tersebut”.(Hasil wawancara dengan MI, 10 Mei 2022).

Tambahan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat melihat dan mengamati proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa memberikan sumbangsi berupa tenaga atau ikut bergotong royong pada saat pelaksanaan pembangunan masih sangat minim. Mengapa demikian karena disebabkan oleh beberapa hal terutama terkait dengan pekerjaan mayoritas masyarakat setempat, dan kurang adanya komunikasi yang baik antar pemerintah atau para aparat desa dengan masyarakat”.(Hasil wawancara dengan MN, 15 Mei 2022).

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa jelas masyarakat berupa tenaga di desa Patongloan masih sangat minim karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu dari segi pekerjaan, kurangnya komunikasi yang baik dan Kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat kurang maksimal. Sehingga partisipasi berupa tenaga dalam proses pembangunan kurang di respon atau bersifat acuh tak acuh terhadap pelaksanaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Keith Davis (sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan sastropoetro(1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran kedalam suatu kegiatan berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.

Pembangunan pada partisipasi adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi dalam bentuk tenaga. Maka dari itu perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi yang dapat membangun atau meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Partisipasi keahlian (*participation with skill*)

Partisipasi masyarakat berupa keahlian atau keterampilan adalah salah satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat melalui keterampilan yang dimiliki terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial.

Berikut wawancara dengan Kepala Dusun yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang infrastruktur di Desa Patongloan itu cukup banyak tetapi hanya ada beberapa orang yang mau bisa ikut berpartisipasi:.(Hasil wawancara dengan US, 17 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Desa Patongloan sebenarnya memiliki masyarakat yang cukup banyak memiliki keterampilan di bidang pembangunan infrastruktur. Namun masyarakat tidak ikut berpartisipasi memberikan keahlian pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung. Apabila masyarakat sekitar ikut berpartisipasi secara sukarela maka pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Namun ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Seperti yang dinyatakan oleh BPD yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Patongloan dalam memberikan keahlian dibidang pembangunan infrastruktur saya rasa sangat minim, karena masyarakat lebih memilih mengerjakan pekerjaannya. Padahal jika di fikir apabila masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan keahliannya secara sukarela akan memberikan manfaat sangat besar karena pembangunan ini kan untuk masyarakat sendiri otomatis jika pengerjaannya cepat dilakukan maka akan berdampak baik untuk kesejahteraan umum, misalnya pembangunan drainase dan jalan”.(Hasil wawancara dengan LA, 20 Mei 2022).

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi masyarakat di desa Patongloan disebabkan oleh faktor pekerjaan dari mayoritas masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak cukup efektif untuk dikerjakan secara cepat walaupun pemerintah sudah memberikan tenaga ahli dibidangnya dan diberikan upah untuk mengerjakan pembangunan tersebut.

Pendapat yang berbeda dengan masyarakat yang diwawancarai oleh penulis yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya cukup memiliki keahlian sebagai pekerja bangunan namun saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena memiliki pekerjaan untuk menggarap lahan kebun seperti yang dilakukan mayoritas masyarakat disini, kadang kalau ada waktu senggang saya bisa ikut berpartisipasi. Tetapi kan sudah banyak pekerja yang diarahkan pemerintah untuk mengerjakan jadi lebih baik kami serahkan kepada pihak pemerintah saja”.(Hasil wawancara dengan MI, 23 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat terkendala dari segi pekerjaan yang dilakukannya sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur, walaupun begitu seharusnya pemerintah dan masyarakat setempat harusnya bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Ini sesuai teori yang ada dari bab II Sastropoetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari sekedar kegiatan fisik semata. Dengan kata lain masyarakat yang sadar akan pentingnya tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur akan mudah untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang hendak diinginkan oleh suatu bangsa.

Pembangunan adalah suatu perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan suatu kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Menurut teori dari Siagian (1994:9) yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang

terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan teori dari siagian ini masyarakat harus paham akan perannya sebagai masyarakat dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dan pemerintah yang memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

4. Partisipasi Barang (*Material participation*)

Sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa: bagian kesatuan pendapatan pasal 9 angka 6 swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (c) adalah pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang.

Partisipasi masyarakat desa Patongloan dalam menyumbangkan swadaya atau tenaga untuk pembangunan fisik baik perbaikan jalan, pembuatan jamban RTM dan drainase. Kompensasi ini merupakan kesepakatan pemerintah desa Patongloan dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik. Kategori yang termasuk dalam partisipasi barang yakni sarana dan prasarana yang berbentuk peralatan. Masyarakat dalam hal ini memberikan alat dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Patongloan agar berjalan lancar.

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Kami melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal bisa memberikan kontribusi berupa pekakas atau peralatan yang dibutuhkan pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik guna memperlancar proses pengerjaan pembangunan, walaupun pemerintah telah menyediakan atau memfasilitasi proses pelaksanaan pembangunan tetapi jika ada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi justru itu lebih bagus”. Hasil wawancara dengan AS, 25 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan kontribusi berupa alat dan perkakas untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan walaupun pemerintah telah memfasilitasi proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Senada dengan hasil wawancara dengan anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan alat atau perkakas yang bisa digunakan atau layak pake dalam rangka mempercepat pembangunan, kare pada saat pengerjaan pembangunan infrastruktur kadang tukang bangunan tidak membawa peralatan atau lupa membawa alatnya. Maka dari itu bisa jadi masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur meminjamkan perkakas yang dapat digunakan tersebut”.(Hasil wawancara dengan LA, 26 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat agar kiranya jika ingin ikut berpartisipasi dalam bentuk barang bisa meminjamkan alat alat atau perkakas yang bisa layak pake untuk berlangsung pembangunan infrastruktur itu sendiri dan untuk mempercepat proses pembangunan tersebut.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Pada saat pembangunan kami kadang memberikan atau meminjamkan alat atau perkakas yang dibutuhkan para pekerja untuk menunjang kelancaran proses pembangunan tersebut gerobak,selang,air atau alat lainnya”.(Hasil wawancara dengan LA, 28 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat antusias ikut berpartisipasi untuk meminjamkan alat dan perkakas yang

dibutuhkan untuk kelancaran pengerjaan pembangunan tersebut, dalam hal ini masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa barang yang dipinjamkan kepada para pekerja untuk menunjang pekerjaan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang panjang, harus ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk proses pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan arahan atau kebijakan dari pemerintah. Seperti teori yang ada pada bab II (sastropoetro:1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari sekedar kegiatan fisik semata. Dengan kata lain pelaksanaan pembangunan harus mampu terkordinasi dengan baik atau dengan perencanaan program dari kebijakan pemerintah ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut terlibat dengan sukarela tanpa ada paksaan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

5. Partisipasi Dana (*Maney participation*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana desa.

Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk dana berupa uang ataupun sebagainya tetapi dilihat dari pendapatan masyarakat di desa Patongloan ini yang mayoritas sebagai petani jadi mungkin banyak dari masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi memberi uang tetapi bisa dalam bentuk lain”.(Hasil wawancara dengan AB, 30 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk uang karena dilihat dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakat yaitu dari hasil petani. Tetapi masyarakat yang memiliki sisi materi yang berkecukupan bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan uang secara langsung untuk menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.

Senada dengan pendapat dari anggota BPD desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Memang betul dari segi pemerintah tidak memungut uang dari masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur ataupun program pembangunan lainnya, jika pun ada dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk uang kami sangat senang. Tetapi masyarakat disini kadang membuatkan makanan ringan ataupun sekedar minuman. Walaupun masyarakat tidak secara langsung memberikan uang tapi bisa dalam bentuk seperti itu”.(Hasil wawancara dengan LA, 1 Juni 2022).

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak langsung memberikan tetapi dengan cara membuatkan makanan untuk para pekerja. Itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam hal memberikan kontribusi walaupun secara tidak langsung.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Patongloan yang mengatakan bahwa:

“Saya memang tidak bisa ikut berpartisipasi memberikan kontribusi berupa uang pada program pembangunan infrastruktur karena faktor ekonomi, kami hanya bisa memberikan sedikit makanan ringan ataupun minuman untuk para buru yang sedang bekerja tersebut.”(Hasil wawancara dengan NA, 2 Juni 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak secara memberikan kontribusi berupa uang karena faktor pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat di desa Patongloan masih sangat rendah.

Sebagaimana teori dari bab II Sastropetro:1998 yang mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam bentuk uang tidak harus secara langsung tapi bisa dengan membuatkan makanan seadanya sebagai bentuk keterlibatan dalam proses pembangunan tersebut. Sedangkan teori dari Todaro (2000:18) yang mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Beranjak dari teori tersebut bahwasanya masyarakat bisa ikut terlibat atau berpartisipasi dalam memberikan kontribusi berupa materi atau uang jika pendapatan masyarakat bisa tercukupi.

Dari bentuk partisipasi di atas dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan tidak lepas dari banyaknya kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

“Ada berbagai bentuk hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan ini yaitu: 1). Adanya kebijakan dari pemerintah desa yang tidak melibatkan atau membatasi lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan hanya diwakilkan kepada para aparat atau kepada para stakeholder. Masyarakat menjadi objek dari program pembangunan infrastruktur bukan sebagai subjek. 2). Masyarakat yang ikut dalam perencanaan seringkali terjebak dari proses perencanaan, dimana masyarakat merencanakan keinginan bukan berdasarkan tingkat kebutuhan. 3). Terkadang masyarakat yang di undang untuk terlibat tidak hadir dalam proses perencanaan, dan masyarakat yang seharusnya hadir tidak di undang oleh pihak pemerintah desa., Karena adanya faktor kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri. 4). Kebijakan dari pemerintah pusat yang memiliki peraturan yang mengikat sehingga tidak adanya kewenangan dari desa untuk melaksanakan program pembangunan tersebut. 5). Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap program pembangunan. (Hasil wawancara dengan AB, 4 Juni 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan terdapat banyak kendala atau hambatan baik dari masyarakat itu sendiri atau kebijakan program dari pemerintah desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat minim dilihat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat atau terkesan bersifat apatis terhadap pembangunan karena adanya batasan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat setempat untuk memberikan aspirasi secara langsung. Strategi pemerintah yang tidak optimal dalam menerapkan kebijakan terhadap pembangunan belum mampu menuai perubahan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Patongloan masih sangat minim karena sifat masyarakat yang cenderung

apatis terhadap proses pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah dan masyarakat tidak bisa kerja sama dengan baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat membuat masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung dan merasa nggan untuk ikut terlibat membuat keputusan dalam proses perencanaan.

Pembangunan infrastruktur berasal dari proses perencanaan yang baik sehingga menghasilkan pembangunan yang baik pula. Jika masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari awal proses penentuan arah maka masyarakat akan terlibat untuk ikut memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur ini dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

C. Pembahasan Penelitian

Keberhasilan suatu pembangunan yang bersifat partisipatif tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Namun tidak terlepas juga dari berbagai hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan partisipatif ini tidak hanya usaha dari pemerintah semata ataupun masyarakat itu sendiri, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antar pemerintah dengan masyarakat yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan dari penduduk desa maupun seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan yang ada di Desa Patongloan merupakan cerminan keberhasilan dari pembangunan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah

bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan dengan adil dan sejahtera.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat merupakan suatu keberhasilan dari pembangunan tersebut, karena adanya pencapaian target program pembangunan yang perlu ditunjukkan pada kebijakan pemerintah. Sehingga sehubungan dengan ini hasil penelitian dapat dikaitkan bahwa pembangunan partisipatif juga dapat ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

1. Partisipasi pikiran (*physicilogical participation*)

Partisipasi pikiran sebagai bentuk keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dalam merumuskan masalah atau dalam proses perencanaan baik secara emosional maupun mental terdapat hambatan dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) diketahui bahwa dalam pelaksanaan perumusan masalah dan pengambilan keputusan tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan seperti rapat Musrembang dan proses RPJMDes, jika masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut maka masyarakat akan lebih berpartisipasi karena masyarakat merasa mengetahui bentuk rencana jenis pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dan beberapa banyak anggaran serta jenis anggaran apa yang digunakan seperti

ADD, ADDS, ataupun APBD dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga masyarakat ikut memikul beban dan tanggung jawab bersama. Agar pembangunan ini dapat dirasakan secara merata dan keadilan oleh masyarakat.

2. Partisipasi Tenaga (*physical participation*)

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam bentuk tenaga sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerjasama dengan masyarakat untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Namun tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tidak menutup kemungkinan ditemukan hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) dimana partisipasi masyarakat di Desa Patongloan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih sangat minim, ditinjau dari banyaknya masyarakat yang tidak hadir untuk ikut berpartisipasi pada saat kegiatan seperti gotong royong dan kerja bakti, ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat untuk mengarahkan dalam memberikan kontribusi dalam bentuk fisik sehingga masyarakat akan terfokus kepada kesibukan pekerjaan masing-masing.

3. Partisipasi Keahlian (*participation with skill*)

Peran masyarakat dalam memberikan sumbangan keahlian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan keterampilan. Keterlibatan masyarakat ini tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan dalam

kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini perlu di sikapi sebagai dinamika dalam memberikan suatu pekerjaan yang berbeda tingkat ragamnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) dimana kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam memberikan keterampilan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap pembangunan walaupun masyarakat desa Patongloan cukup banyak yang memiliki keterampilan di bidang infrastruktur seperti tukang bangunan. Sehingga masyarakat menyerahkan kepada pihak pemerintah sepenuhnya untuk menyelesaikan kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4. Partisipasi Barang (*Material participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang baik berupa alat-alat bangunan maupun perkakas dalam menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam wujud barang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori Keith Davis (sastropetro.1998:51) masyarakat antusias ikut serta terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa Patongloan yaitu meminjamkan alat-alat kerja manual namun lebih kepada alat yang kurang berkualitas. Dengan begitu alat yang dipinjamkan tersebut kurang memiliki nilai manfaat untuk dipergunakan oleh pekerja lapangan.

5. Partisipasi Uang (*Money participation*)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa memberikan kontribusi berupa dana atau iuran, kendati bentuknya tidak selalu uang tunai secara langsung namun bisa berupa proses pengajuan-pengajuan yang dilaksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan iuran dana dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ini belum senada dengan teori Keith Davis (Sastropoetro.1998:51) dimana partisipasi masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada karena rendahnya tingkat pendapatan ekonomi dari masyarakat desa Patongloan untuk bisa berpartisipasi dalam bentuk uang, sehingga masyarakat lebih memilih memberikan kontribusi dalam bentuk makanan ringan bataupun hanya sekedar minuman.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan yaitu:

1. Partisipasi pikiran, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi pikiran dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami dalam proses pengambilan keputusan baik itu bentuk gagasan dari tokoh masyarakat deesa maupun proses Musrembang ataupun RPJMDes yaitu:
 - a. Dapat diketahui bahwa masyarakat yang mewakili belum mampu menyampaikan aspirasinya atau seringkali terjebak dalam proses perencanaan bukan berdasarkan tingkat prioritas dari masyarakat itu

sendiri sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa.

- b. Dalam pengidentifikasian masalah atau perumusan masalah dalam proses Musrembang dan RPJMDes masyarakat yang seharusnya di undang tidak di undang karena adanya kebijakan dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Partisipasi Tenaga, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi tenaga dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu minimnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan bantuan secara fisik berupa gotong royong dan kerha bakti pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Partisipasi Keahlian, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi keahlian dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu kurangnya pemahaman sehingga mengakibatkan masyarakat lebih terfokus kepada kesibukan masing-masing.
4. Partisipasi Barang, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi barang dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu masyarakat memberikan peralatan yang kurang layak atau kurang berkualitas pakai untuk dipinjamkan kepada pekerja disebabkan karena masyarakat tidak memiliki banyak materi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
5. Partisipasi Uang, berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai

partisipasi uang dapat diketahui hambatan yang dialami masyarakat dimana tidak secara langsung dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk uang secara tunai namun dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada pekerja disebabkan karena redahnya tingkat pendapatan yang mayoritas masyarakat desa hanyalah petani.

Dari beberapa hambatan di atas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan:

1. Partisipasi pikiran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa mengatasi hambatan dalam memberikan kontribusi berupa pikiran dimana masyarakat memberikan aspirasi yang bersumber dari tokoh masyarakat ataupun yang mewakili dalam pengambilan keputusan harus mampu memprioritaskan skala kebutuhan dari masyarakat desa Patongloan daripada keinginan saja, dan pemerintah desa seperti kepala dusun sebagai pemerksaan yang dekat dengan masyarakat harus mampu membangun komunikasi yang baik antar masyarakat agar aspirasi yang diberikan masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaan musyawarah dapat tersampaikan secara langsung sehingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan individu menjadi kepentingan umum.
2. Partisipasi Tenaga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah desa

dapat melakukan sosialisai untuk mengajak, mengarahkan serta melakukan komunikasi yang baik akan pentingnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat merasa sadar dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

3. Partisipasi keahlian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam hambatan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi keahlian yaitu pemerintah desa dapat menunjuk masyarakat sebagai tenaga ahli agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam partisipasi keahlian.
4. Partisipasi Barang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi dalam bentuk barang di desa Patongloan dengan memberikan perintah kepada masyarakat untuk memberikan alat atau perkakas manual yang bisa dipakai dengan layak yang menunjang pembangunan karena nantinya juga dapat bertimbal balik kepada masyarakat.
5. Partisipasi Uang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan masyarakat dalam partisipasi memberikan kontribusi berupa uang di desa Patongloan untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa Patongloan bisa dalam bentuk makanan atau minuman karena dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat

maka masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa makanan atau dalam bentuk terprosedur dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari beberapa hambatan terhadap pembangunan infrastruktur di atas seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat yaitu:

- a. Transparansi (keterbukaan), pemerintah harus transparansi terhadap program pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat mengetahui informasi terhadap program pembangunan baik itu anggaran pengelolaan pembangunan ataupun anggaran belanja dana desa melalui papan informasi.
- b. Partisipasi, keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan dimana masyarakat dijadikan subjek bukan hanya sekedar objek dari kebijakan program pembangunan tersebut.
- c. Dapat dinikmati, program pembangunan yang partisipatif merupakan program yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena pembangunan tersebut adalah program yang di tujukan kepada masyarakat sehingga program pembangunan ini dapat dirasakan secara keseluruhan, berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), program pembangunan adalah kegiatan antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerjasama dengan masyarakat sehingga program

pembangunan infrastruktur ini dapat dipertanggung jawabkan, baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang ikut terlibat.

- e. Berkelanjutan (sustainable), program pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Dimana program ini masyarakat terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi dari pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur dapat dirasakan dan di jaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal mutlak tercapai suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan dengan adil dan sejahtera.

Pemerintah harus mampu menerapkan strategi kebijakan atau upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan pedesaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan pokok, sarana dan prasarana, sumber daya dan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Serta disebutkan juga dalam peraturan Menteri dalam negeri republik indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*), masyarakat di Desa Patongloan masih sangat minim dalam proses Musrembang dan RPJMDes sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasi dengan baik.
2. Partisipasi Tenaga (*physical participation*), partisipasi di desa Patongloan masih sangat minim dalam memberikan kontribusi berupa tenaga dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat setempat.
3. Partisipasi Keahlian (*participation with skill*), masyarakat di Desa Patongloan cenderung bersifat apatis karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sehingga masyarakat hanya terfokus kepada kesibukan masing-masing.
4. Partisipasi Barang (*Material participation*), masyarakat di desa Patongloan sudah ikut berpartisipasi dengan meminjamkan alat atau perkakas namun kualitasnya kurang baik.
5. Partisipasi Uang (*Money participation*), masyarakat di Desa Patongloan belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam bentuk uang secara tunai namun masyarakat bisa memberikan makanan seadanya kepada pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya akan bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang:

1. Masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun.
2. Perlu adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan pemahaman dan kesadaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan.
4. Perlu adanya bentuk transparansi atau informasi kepada masyarakat mengenai dana anggaran dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_\(02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_(02-13-17-04-19-07).pdf)
- Inggrid Kawulur, Marlien T. Lopian, J. E. kaawoa. (2007). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. *Fisipol*, 1–14.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kurniyati, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 7.
- Nain, U. (2019). Pembangunan desa. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, 1.
- Suryosubroto. 2002. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurwanda, A. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (studi analisis kebijakan pemerintah desa). *Ilmu Pemerintahan*, 28-39.

- Orocomna, L. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan(studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara). *Jurnal governance*.
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondown). *Jurnal eksekutif.1*(1).
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDENA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 261-270.
- Suwandi, & Rostyanin gsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa S







**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Abduddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : disip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0496/FSP/A.6-VIII/III/1443 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nining
S t a m b u k : 105611117918
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
Judul Skripsi : **"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang"**

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Maret 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 04 April 2022

Nomor : 185/DPMPSTSP/IP/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Patongloan
Di-
Kec. Baroko

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 849/05/C.4-VIII/43/2022 tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nining
Tempat Tanggal Lahir : Redak, 06 Juli 1999
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Redak Desa Patongloan Kec. Baroko

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 04 April 2022 s/d 31 Mei 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPSTSP Kab. Enrekang


Dr. Ir. CHADAR DULU, ST.,MT
Rangkai, Pembina Tk. I
AIR. A. 9750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

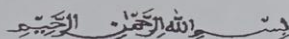
01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Baroko.
04. Ketua LP3M Univesitas Muhammadiyah Makassar.
05. Yang Bersangkutan (Nining).
06. Pertinggal.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nining

NIM : 105611117918

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juli 2022/

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzuliah Salam M.I.P.
NBM. 964 591



AB Il Nining - 105611117918

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

1% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 **123dok.com** 8%
Internet Source

2 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Part IV 1%
Student Paper

3 **ppid.blorakab.go.id** <1%
Internet Source

Exclude quotes ☒ On Exclude matches ☐ Off
Exclude bibliography ☒ On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB III Nining - 105611117918

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX

6% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- Submitted to Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Student Paper 6%
- id.scribd.com
Internet Source 2%
- repository.radenintan.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Nining - 105611117918

ORIGINALITY REPORT

LULUS

8% SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id 8%
Internet Source

Exclude quotes ☒ On

Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SAB V Nining - 105611117918

ORIGINALITY REPORT

4 **LULUS** **4%**

turnitin

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

0% 0% 0%

PRIMARY SOURCES

1 eprints.uns.ac.id 2%
Internet Source

2 id.123dok.com 2%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Dokumentasi di Kantor Desa Patongloan



Wawancara dengan Kepala Desa Patonglon



Wawancara dengan sekretaris desa Patongloan



Wawancara dengan Anggota BPD



Wawancara dengan Ketua BPD



Wawancara dengan salah satu warga masyarakat



a. Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) dalam bentuk partisipasi pikiran



b. Rapat Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam bentuk partisipasi pikiran



c. Kondisi jalanan sebelum dalam perbaikan



d. Pembuatan jalan tani dalam bentuk partisipasi tenaga



e. Pembuatan Jamban RTM dalam bentuk partisipasi keahlian



f. Pembuatan Jamban RTM



g. Pembuatan Drainase

RIWAYAT HIDUP



Nining, Lahir di Redak, 06 Juli 1999. Anak terakhir dari pasangan Ayahanda Nurdin dan Ibunda Nurjannah. Penulis memulain pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 10 Redak hingga tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alla dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Tana Toraja. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2022 dengan Menyusun Skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang” .